

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laba perusahaan merupakan informasi penting yang terdapat dalam laporan keuangan yang menjadi penentu keberhasilan kinerja perusahaan dalam mengelola operasionalnya. Keberhasilan perusahaan diukur melalui kemampuannya dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Pihak manajemen memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh sumber daya perusahaan untuk dikelola secara efektif dan efisien dan juga merupakan bentuk penilaian dari para *stakeholder* dalam menilai kemampuan perusahaan untuk mencapai laba. Laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu dapat menjadi faktor pertimbangan bagi para *stakeholder* untuk memprediksi potensi laba pada tahun berikutnya (Sihombing, 2020).

Laba menjadi salah satu data yang cenderung dimanipulasi oleh manajemen perusahaan karena umumnya keuntungan merupakan fokus utama dalam menilai kinerja perusahaan dan sebagai proyeksi bagi pihak eksternal untuk menilai kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Manajemen akan bertindak ketika mereka gagal mencapai target laba yang telah direncanakan. Mereka akan memanfaatkan fleksibilitas yang diperbolehkan dalam standar akuntansi untuk menyusun laporan keuangan dengan memanipulasi laba yang sebenarnya diperoleh agar tampak lebih baik saat dilaporkan (Jeradu, 2021).

Laporan keuangan juga memiliki peranan penting bagi manajemen untuk menunjukkan sejauh mana efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan serta menjadi fungsi pertanggungjawaban manajemen terhadap kinerja perusahaan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, baik oleh pihak eksternal maupun internal perusahaan. Pihak eksternal akan menilai kemampuan manajemen dalam mengelola dana perusahaan, sehingga penting bagi laporan keuangan untuk memiliki kualitas yang baik. Laporan keuangan yang berkualitas dapat mengatasi masalah asimetri informasi. Meskipun demikian, seringkali manajemen perusahaan memiliki motivasi untuk memaksimalkan keuntungan atau kesejahteraan pribadi mereka, seperti melalui praktek manajemen laba (Felicicia & Sutrisno, 2020).

Manajemen laba dapat merusak kredibilitas laporan keuangan perusahaan dengan menambah bias ke dalamnya, maksud dari menambah bias dalam laporan keuangan berarti menggunakan metode-metode akuntansi tertentu untuk menciptakan laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan investor atau keinginan manajer sehingga laporan keuangan menjadi lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Akibatnya, pengguna laporan keuangan mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba yang sesungguhnya (Sari & Khafid, 2020).

Fenomena terjadinya praktik manajemen laba terjadi pada perusahaan Apple di Korea Selatan. Yang Jeong-sook selaku anggota parlemen Korsel

mengatakan bahwa Apple telah memanipulasi rasio laba terhadap total penjualan (*operating profit margin*) untuk membayar pajak dengan nominal lebih rendah. Menurut Yang, laba operasi Apple di Korea Selatan lebih rendah dikarenakan Apple Korea mengeluarkan sebagian besar pengeluarannya untuk impor. Apple Korea mengimpor produk melalui Apple Asia Selatan di Singapura. Dari transaksi tersebut, Apple Korea mengeluarkan pembayaran senilai 6,7 triliun won tahun lalu. Jumlah ini sebesar 95% dari total penjualannya. Rasio laba operasi Apple Korea sebesar 1,6%, sedangkan rasio laba operasi Apple secara keseluruhan sebesar 29,8%. Tahun lalu, Apple Korea membayar PPh badan senilai 62,8% miliar won atau 0,9% dari total peredaran usahanya. Pada 2021, total peredaran usaha Apple Korea mencapai 7,097 triliun won (www.news.ddtc.co.id).

Kasus lain juga terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (AJS). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan dalam pemeriksaan investigasi pendahuluan, ditemukan adanya rekayasa laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (AJS). BPK menemukan adanya manipulasi laba sebesar Rp360,3 miliar pada 2006. Ketua BPK Agung Firman Sampurna (2020) mengatakan bahwa pada pembukaan laba keuangan AJS mendapat opini adverse atau dimodifikasi. Apabila saat itu Jiwasraya melakukan pencadangan, maka akan terlihat kerugian sebesar Rp15,3 triliun. Pada 2017, BPK melihat adanya kecurangan pencadangan sebesar Rp7,7 triliun. Jika pencadangan dilakukan sesuai ketentuan, seharusnya perusahaan mengalami kerugian. Meski 2006 perusahaan masih laba, tetapi laba yang dimaksud yaitu laba semu sebagai

akibat rekayasa akuntansi atau *window dressing*. Pada 2018, PT AJS membukukan kerugian unaudited sebesar Rp15,3 triliun dan hingga September 2019, diperkirakan kerugian PT AJS mencapai Rp13,7 tahun. Kemudian pada bulan November 2019, PT AJS diperkirakan mengalami negatif equity sebesar Rp27,2 triliun. Lebih lanjut, Agung juga menduga adanya kegiatan merekayasa akuntansi atau *window dressing* pada penjualan JS *Saving Plan*. Pihak Jiwasraya ternyata menaruh dana JS *Saving Plan* ke saham-saham yang berkualitas rendah seperti TRIO, SUGI, dan LCGP. Kerugian itu terjadi karena PT AJS menjual produk *saving plan* dengan *cost of fund* yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi yang dilakukan secara masif sejak 2015. Dana dari *saving plan* tersebut diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana yang berkualitas rendah, sehingga mengakibatkan adanya negatif separated (www.cnbcindonesia.com).

Laporan keuangan Jiwasraya pada tahun 2017 dapat dianggap sebagai upaya manajemen laba. Pencadangan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan menyebabkan laporan keuangan Jiwasraya tidak dapat dinyatakan dalam kondisi rugi. Sehingga, informasi dalam laporan keuangan menjadi lebih menarik bagi berbagai pihak terkait, khususnya para pengguna jasa asuransi. Meskipun demikian, informasi ini dapat menyesatkan dan menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak. Manajemen melakukan praktik manajemen laba dengan tujuan memanipulasi angka laba yang disajikan. Diantara berbagai pola manajemen laba, teknik perataan laba seringkali digunakan oleh manajemen untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri ataupun kepentingan

perusahaan. Manajemen laba dilakukan dengan memanipulasi laporan keuangan agar sesuai dengan kepentingan yang ada. Proses perekayasaan laporan keuangan melibatkan berbagai pihak, mengingat dampaknya yang signifikan dan berjangka Panjang (Helmi et al., 2023).

Kasus PT Asuransi Jiwasraya timbul karena manajemen berupaya agar laporan keuangan terlihat menarik dimata investor, padahal kondisi sebenarnya berkebalikan. Selain itu, praktik manajemen juga dilakukan agar reputasi perusahaan tetap positif dan dapat menarik investor untuk berinvestasi. Maka dari itu, penting untuk memberikan pemahaman kepada investor mengenai konsep dan praktik manajemen laba.

Situasi di atas akan menimbulkan suatu kondisi yang dikenal sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*) yang merujuk pada ketidakseimbangan perolehan informasi antara manajemen sebagai penyedia informasi (*prepaper*) dan pihak pemegang saham serta *stakeholder* lainnya sebagai pengguna informasi (*user*). Adanya asimetri informasi memungkinkan timbulnya konflik yang terjadi antara *principal* dan *agent* untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain guna kepentingan sendiri. Permasalahan tersebut dapat mempengaruhi manajemen dalam melakukan manajemen laba diantaranya yaitu *tax planning*, *leverage*, dan *corporate social responsibility* (Lisa, 2021).

Perusahaan seringkali menggunakan *tax planning* sebagai dorongan untuk melakukan praktik manajemen laba. Upaya untuk mengurangi

pembayaran pajak sering disebut sebagai *tax planning* atau perencanaan pajak. Biasanya *tax planning* mengacu pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak (WP) agar kewajiban pajak dapat diminimalkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan antara wajib pajak (WP) dan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena pembayaran pajak dapat mengurangi kemampuan ekonominya. Sementara itu, pemerintah membutuhkan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar didapatkan dari penerimaan pajak. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih yang diperoleh (Suheri et al., 2020).

Tax planning merupakan cara yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan manajemen perpajakan dari usaha atau pendapatannya. *Tax planning* yang dimaksud adalah *tax planning* yang dilakukan tanpa melakukan pelanggaran konstitusi dan sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Tujuan perusahaan dalam melakukan *tax planning* adalah untuk mengoptimalkan penghematan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Hasil akhir dari proses *tax planning* yaitu diharapkan dapat meminimalkan utang pajak, baik itu PPh maupun pajak-pajak lainnya selama berada dalam batas-batas yang telah diatur oleh peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani dan Haryati, 2023) menunjukkan bahwa *Tax Planning* memberikan pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri makanan maupun

minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2017-2021. Tim manajemen bisa memakai *Tax Planning* sebagai strategi dalam usahanya untuk mencapai target manajemen laba. Ketika organisasi terlibat dalam *Tax Planning* secara teratur, mereka memperlihatkan tingkat manajemen laba yang lebih tinggi. Hal tersebut disebabkan para pelaku bisnis lebih sering mengontrol keadaan keuangannya dalam mendapatkan keuntungan relevan dengan tujuannya.

Hal ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2021), penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa *Tax Planning* tidak berpengaruh terhadap perusahaan dalam melakukan manajemen laba, artinya semakin tinggi *Tax Planning* tidak akan berpengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan manajemen laba

Faktor kedua yang mempengaruhi manajemen laba yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan utang yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai aset-asetnya dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi jumlah utang perusahaan, maka semakin tinggi tuntutan pemilik terhadap tingkat keuntungan agar perusahaan dapat menghindari risiko likuidasi (Asyati & Farida, 2020). Penggunaan rasio *leverage* dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat perilaku manajer dalam praktik manajemen laba sebagai upaya meningkatkan laba perusahaan. Penggunaan utang yang berlebihan dapat menimbulkan risiko serius bagi perusahaan karena akan masuk dalam kategori *extreme leverage* yaitu keadaan dimana perusahaan terperangkap dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk mengurangi

beban hutang. Tingkat *leverage* yang tinggi dapat meningkatkan risiko kebangkrutan, sehingga manajemen laba menjadi salah satu strategi untuk memanipulasi laporan keuangan guna menciptakan kesan yang menguntungkan dimata investor (Setiowati et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh (Susanti et al., 2022) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan tidak selaras dengan penelitian (Lutfiyah et al., 2023) yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Tingginya tingkat *leverage* yang terlihat pada tingginya nilai utang berimbas pada manajemen yang kesulitan memprediksi masa depan perusahaan. Kemudian, para kreditur akan melakukan pengawasan yang ketat karena perusahaan memiliki utang yang besar. Maka dari itu, manajer akan kurang fleksibilitas dalam bertindak manajemen laba. Sehingga seperti yang dihasilkan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi *leverage* maka mengurangi motivasi manajer terhadap manajemen laba. Begitu juga jika tingkat *leverage* rendah maka akan meningkatkan tindakan manajemen laba oleh manajer.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi manajemen laba yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam operasionalnya, perusahaan memiliki tanggung jawab eksternal berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial. Pelaksanaan kegiatan CSR merupakan suatu tindakan yang menjadi kewajiban perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang

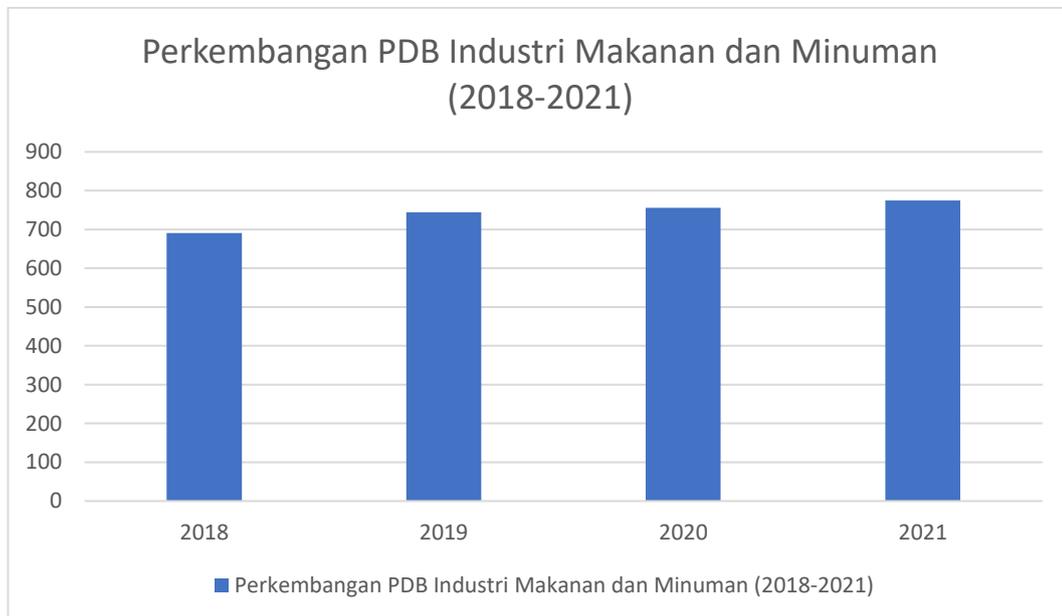
perseroan terbatas dan peraturan pemerintah No.47 Tahun 2012 mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa setiap perseroan yang bergerak dalam bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan yang aktif melakukan kegiatan CSR dan mencantumkannya dalam laporan keuangannya dapat memperoleh manfaat berupa reputasi positif di mata masyarakat dan investor. Reputasi positif yang dihasilkan dari pelaksanaan dan pelaporan CSR tersebut dapat menjadi peluang bagi manajemen untuk melakukan tindakan manajemen laba, karena secara tidak langsung investor maupun pengguna laporan keuangan lainnya telah memberikan penilaian positif terhadap perusahaan (Ramadhani & Haryati, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh (Sihotang & Budiwitjaksono, 2024) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba dengan proksi *cash flow of operation* dan *discretionary expense* sedangkan pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *production cost*. Namun, penelitian (Zulkarnain & Helmayunita, 2021) menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Tingginya tingkat CSR memungkinkan bahwa perusahaan akan menerapkan praktik manajemen laba. Pengungkapan CSR membuka ruang lebih besar bagi manajemen perusahaan untuk menerapkan tindakan manajemen laba, karena dapat membuat respons positif kepada investor dan masyarakat terhadap

aktivitas CSR sehingga dapat menutupi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh manajer.

Objek penelitian yang digunakan yaitu perusahaan manufaktur sub sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2019-2022. Perusahaan manufaktur sub sektor industri makanan dan minuman merupakan sektor tertinggi yang memberi kontribusi dalam sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Industri makanan dan minuman mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 2,54% menjadi Rp775,1 triliun, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan produk domestik bruto (PDB) industri makanan dan minuman nasional atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp1,12 kuadriliun pada 2021. Nilai tersebut porsinya sebesar 38,05% terhadap industri pengolahan nonmigas atau 6,61% terhadap PDB nasional yang mencapai Rp16,97 kuadriliun. Pada tahun 2022 juga mengalami kenaikan mencapai Rp1,23 kuadriliun, porsi tersebut mencapai 6,32% dari total perekonomian nasional yang mencapai Rp19,59 kuadriliun. Makanan dan minuman tersebut juga berkontribusi lebih dari sepertiga (38,35%) terhadap total PDB industri pengolahan nonmigas yang nilai totalnya Rp3,23 kuadriliun. Porsi tersebut merupakan yang terbesar dibanding industri lainnya.

Gambar 1 1 Perkembangan PDB Industri Makanan dan Minuman (2018-2022)



Industri pengolahan makanan dan minuman telah menjadi salah satu sektor yang sangat berkembang di Indonesia, di mana banyak perusahaan bersaing untuk mendominasi pasar. Mayoritas bisnis di industri ini adalah usaha kecil atau mikro, meskipun sejumlah perusahaan besar mendominasi pasar. Salah satu contohnya adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) yang mencatatkan penjualan bersih perusahaan sebesar Rp17,18 triliun selama kuartal I 2022 atau selama tiga bulan pertama tahun ini. Selain itu, ada juga perusahaan besar lain seperti Wings Group dan Garuda Food yang merupakan anak perusahaan dari Tudung Group. Perusahaan-perusahaan tersebut telah memulai strategi untuk tidak hanya menarik pelanggan dengan harga kompetitif, tetapi juga fokus pada inovasi produk. Mereka berusaha menciptakan produk yang disesuaikan dan memberikan nilai tambah dengan tujuan menarik preferensi konsumen Indonesia terhadap makanan tradisional

dalam bentuk instan. Skala produksi dalam perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman mencapai skala yang signifikan dan terdapat potensi untuk pengembangan produk melalui inovasi-inovasi guna memperluas pangsa pasar. Hal ini membuat perusahaan membutuhkan modal yang cukup besar. Laba yang diperoleh juga mencapai tingkat yang tinggi, membuat perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman menjadi salah satu entitas yang aktif beroperasi di pasar modal Indonesia. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang memiliki laba tinggi dan menjalankan operasional yang kompleks, mungkin saja melibatkan praktik manajemen. Hal ini didukung dengan fenomena yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya dan juga PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA). Hal tersebut menjadi alasan peneliti untuk menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman sebagai objek dalam penelitian.

Beberapa usaha dilakukan untuk memaksimalkan laba guna memenuhi berbagai kepentingan, yaitu dengan melakukan manajemen laba. Pemahaman terhadap praktik manajemen laba dapat meningkatkan nilai informasi dalam akuntansi, terutama laporan laba rugi yang menjadi dasar pengambilan keputusan bagi investor. Oleh karena itu, berdasarkan uraian penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisis tentang **“Pengaruh *Tax Planning, Leverage, dan Corporate Social Responsibility* Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah *tax planning* berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *tax planning* terhadap manajemen laba.
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *leverage* terhadap manajemen laba.
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *corporate social responsibility* terhadap manajemen laba.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan tentang manajemen laba serta menambah pengetahuan dalam menganalisis suatu

masalah mengenai *tax planning*, *leverage*, dan *corporate social responsibility* terhadap manajemen laba dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan variabel yang sama maupun variabel lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pihak manajemen perusahaan untuk mencegah tindakan manajemen laba yang dapat merugikan pribadi dan perusahaan.

c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menunjang para investor sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan pandangan lebih terhadap perusahaan yang menjalankan manajemen laba ataupun mengamati beberapa komponen yang memicu manajemen laba sehingga mampu mengurangi risiko dalam mengambil keputusan dalam proses investasi pada suatu perusahaan.